

foreword

by sean macbride sc

This publication presents the situation of more than 55,000 untried political prisoners in Indonesia and describes the plight of their children, wives and families. It makes clear the extent to which the rule of law has been abrogated by the Indonesian Government in its treatment of these men and women, most of whom have now been in prison, invariably in bad conditions, for more than seven years.

During my own visit to Indonesia in 1970, I was able to verify not only the existence of this vast number of prisoners, but also the fact that it is Government policy to detain indefinitely many thousands of prisoners, while admitting publicly that it has no evidence against them of any criminal activity.

These are prisoners of conscience and until all are free, Amnesty International will persist in its efforts to secure for them full human rights as laid down by international convention and agreement.

1973 is the 25th Anniversary of the Declaration of Human Rights; as a member of the United Nations, Indonesia has a moral obligation to recognise the principles contained in the Declaration. Amnesty urges the Indonesian Government to announce during the year a general amnesty for all untried political prisoners.

KATA PENDAHULUAN OLEH SEAN MACBRIDE, S.C. KETUA AMNESTY INTERNATIONAL

Penerbitan ini menunjukkan keadaan para tahanan politik Indonesia yang jumlahnya lebih daripada 55.000 orang yang tak pernah dituntut atau diadili serta melukiskan pula nasib anak-isteri dan sanak-saudara mereka itu. Menjadi jelas betapa jauh sudah "rule of law", kekuasaan hukum ditiadakan oleh pemerintah Indonesia dalam cara memperlakukan para tahanan pria dan wanita itu yang jumlah terbesar rata-rata sudah meringkuk dalam penjara selama lebih dari tujuh tahun dan hidup dalam keadaan sengsara.

Sewaktu dalam tahun 1970 saya mengunjungi Indonesia dapat saya menyaksikan sendiri kenyataan adanya jumlah tahanan yang demikian banyaknya serta juga fakta bahwa memang adalah politik resmi pemerintah untuk menangkap berriburibu tahanan untuk waktu tak tertentu. Pemerintah sendiri pula bahkan mengakui dengan resmi bahwa tidak ada bukti apapun yang terdapat bahwa mereka telah melakukan kejahatan yang dapat dituntut di depan pengadilan.

Mereka jelas sejelas-jelasnya adalah "prisoners of conscience" yaitu ditahan karena keinsyafan batin dan pikiran yang merupakan hak asasi mereka. Selama mereka belum bebas semua, maka Amnesty akan tetap berusaha keras agar bagi mereka dilaksanakan jaminan hak-hak asasi manusia sepenuhnya sebagaimana tertera dalam konvensi dan perjanjian internasional.

Tahun 1973 merupakan Tahun ke-25 Pernyataan Hak-hak Manusia. Sebagai anggauta Perserikatan Bangsa-bangsa Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk mengakui azas-azas yang terkandung dalam Pernyataan tersebut. Amnesty mendesak pemerintah Indonesia agar dalam tahun ini mengumumkan penampungan umum bagi semua tahanan politik yang belum diadili itu.

VOORWOORD DOOR SEAN MACBRIDE, S.C., VOORZITTER VAN AMNESTY INTERNATIONAL

Deze publikatie behandelt de toestand van meer dan 55.000 niet-berechte politieke gevangenen in Indonesië en beschrijft het lot van hun kinderen, vrouwen en familieleden. Het maakt duidelijk in welke mate de Indonesische regering de rechtsregels overtreedt met betrekking tot deze mannen en vrouwen, van wie de meesten, over het algemeen onder slechte omstandigheden, al meer dan zeven jaar gevangen zitten.

Tijdens mijn bezoek aan Indonesië in 1970 kon ik uit eigen waarneming vaststellen dat het hier inderdaad om zo'n groot aantal gevangenen gaat. Ook stelde ik vast dat de regering een politiek voert die er op is gebaseerd duizenden gevangenen voor onbepaalde tijd te interneren, terwijl openlijk wordt toegegeven dat er ten aanzien van deze mensen geen bewijzen bestaan van enig gepleegd misdrijf.

Zij zijn "gevangenen van hun geweten". Totdat allen zijn vrijgelaten zal Amnesty International haar pogingen voortzetten om de gevangenen hun volledige mensenrechten terug te geven, zoals deze zijn vastgelegd in internationale conventies en overeenkomsten.

In 1973 is het 25 jaar geleden dat de Declaratie voor de Rechten van de Mens werd getekend; als lid van de Verenigde Naties heeft Indonesië de morele plicht de beginselen van die Declaratie te erkennen. Amnesty dringt er bij de Indonesische regering op aan in dit jaar een algemene amnestie af te kondigen voor alle onberechte politieke gevangenen.